

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.
Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.

ASPEK KEBIJAKSANAAN HUKUM PENATAGUNAAN TANAH DAN PENATAAN RUANG

Penerbit



SINAR GRAFIKA

SG. 02.16.0681

**ASPEK KEBIJAKSANAAN,
HUKUM PENATAGUNAAN TANAH &
PENATAAN RUANG**

Oleh:
Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.
Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Agustus 2008
Desain cover, Kreasindo Medicita
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-231-2

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muchsin
Aspek Kebijakan, Hukum Penatagunaan Tanah dan
Penataan Ruang / Muchsin dan Imam Koeswahyono; Editor, Tarmizi.
-- Cet. 1. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2008
xviii, 312 hlm.; 21 cm

ISBN 978-979-007-231-2

1. Hukum agraria.
II. Tarmizi

I. Judul

928.41

ASPEK KEBIJAKSANAAN HUKUM PENATAGUNAAN TANAH DAN PENATAAN RUANG

Kebijaksanaan memiliki orientasi guna menyelesaikan masalah tertentu pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu. Dalam proses kebijaksanaan hendaknya dipertimbangkan segala sumber dana dan sumber daya lingkungan serta dipertimbangkan pula sarana yuridis pemerintahan, sehingga bila mengalami kendala dalam pelaksanaannya akan segera memperoleh solusi. Kebijakan publik bersifat mengikat bagi warga negara yang berarti setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Hubungan penatagunaan tanah dengan penataan ruang, yakni penataan tanah merupakan subsistem dari penataan ruang yang harus disusun dalam wujud suatu neraca atau suatu dokumen tertulis yang dilengkapi peta *spasial eksisting* (berwujud) yang substansinya memuat ketersediaan sumber daya tanah maupun sumber daya lainnya dibandingkan dengan kebutuhan sumber daya tanah baik perorangan, badan hukum maupun pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Tentu saja dipersyaratkan adanya pembakuan standar pengumpulan, penyajian, analisis maupun perubahan data sebagai bahan utama penyusunan neraca penatagunaan tanah.

Hasil karya yang berkualitas ini menguraikan dengan detail mengenai aspek kebijaksanaan, hukum penatagunaan tanah dan penataan ruang meliputi kebijakan (konsepsi, orientasi, dan karakteristik); konsepsi dan arah kebijakan pertanahan; hukum dalam konteks perubahan sosial; landasan dan pola penerapan kebijaksanaan tata guna tanah; kebijaksanaan manajemen tanah perkotaan sebuah keniscayaan; epilog sisi kefilisafatan dan teori hukum pengaturan penataan ruang; serta dilengkapi dengan peragaan dan tabel.

ISBN 979-007-231-7



9 789790 072312

Aspek Kebijaksanaan
Hukum Penatagunaan Tanah
Dan Penataan Ruang